BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat sehingga mengubah sejumlah kehidupan masyarakat yang semula secara luring dan kemudian menjadi daring. Idealnya, kehidupan masyarakat pada dasarnya hanya dapat dilakukan secara fisik. Namun dengan bantuan teknologi dengan waktu yang dikorbankan menjadi semakin efisien karena pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ditandai dengan lahirnya komputer, telepon ponsel smartphone, laptop dan lain sebagainya yang dapat memperoleh data, mengolah data dan memproses data seseorang secara aman dan terlindungi.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki segala sektor yang salah satunya adalah electronic health (*e-Health*) yang memberikan sejumlah pelayanan pengobatan, konsultasi, layanan apotek online, dan berbagai informasi kesehatan dalam bentuk aplikasi berbasis internet. *e-Health* di ciptakan untuk memberikan kemudahan kepada Pasien dalam mengakses terhadap layanan kesehatan secara efektif, efisien waktu dan biaya. Namun, informasi kesehatan dan data Pasien yang tercantum dalam aplikasi tersebut tidak terjamin terhadap keamanannya, mengingat Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang mengatur secara khusus dalam mengakomodir permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait perlindungan data pribadi terutama pada bidang *e-Health*.

Pada konstitusi Negara Indonesia telah mengatur bahwa setiap hak asasi seseorang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak atas

¹ Ravlindo Edison. "Perlindungan Hukum Data Kesehatan." Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

perlindungan diri pribadi, berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya.

Warren dan Brandeis merupakan tokoh yang mengemukakan konsep privasi untuk pertama kalinya dalam karya jurnal ilmiah yang berjudul “*The Right to Privacy*” yang berarti hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan kegiatan memiliki hak untuk dilindungi privasinya. Konsep privasi yaitu sebuah gagasan untuk menjamin integritas, martabat dan taraf hidup seseorang, dan setiap orang berhak untuk menentukan siapa, untuk apa dan bagaimana informasi mengenai diri mereka digunakan untuk kepentingan tertentu.² Upaya dalam melindungi hak privasi seseorang sama halnya perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang notabene harus menjamin perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi yang bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan serta pengamanan terhadap informasi pribadi mereka, dan apabila terjadi suatu permasalahan, pemilik data pribadi berhak atas pembenaran dan pembelaan.³

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang menjadi suatu standar dunia yaitu terdapat pada seluruh *Uni Eropa Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data* yang dikenal sebagai *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Pada GDPR telah menganut 6 (enam) prinsip perlindungan data umum, dengan pengertian data pribadi lebih luas, serta terdapat hak baru yaitu untuk portabilitas data individu yang mengharuskan pengendali data memproses sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemilik data pribadi. Pengertian data pribadi dalam GDPR yaitu, suatu data yang dapat mengidentifikasi pengguna seperti nama, data demografi, nomor telepon, alamat IP, nama pengguna online, orientasi

² Latumahina RE, (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*”, Gema Aktualita, Jakarta, Vol.3 No. 2, hlm. 14-25.

³ Djafar Wahyudi, Asep Komarudin, (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, hlm 2.

seksual, data kesehatan dan lain sebagainya.⁴

Sedangkan, pengertian data pribadi pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) yaitu data perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan dijaga kebenarannya serta mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Dalam GDPR juga memiliki pengaturan terhadap pengawasan oleh pihak terkait yaitu adanya suatu lembaga khusus “*The European Data Protection Board*” yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan GDPR pada negara-negara di Uni Eropa. Sedangkan, pada pengaturan di Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi secara menyeluruh melainkan hanya terbatas pada pengawasan sektoral.

Di Indonesia sendiri, apabila kita melihat dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hanya sedikit yang menyinggung terkait dengan perlindungan data pribadi, dapat terlihat dari tiga puluhan pengaturan yang mengatur terkait hal tersebut. Akibatnya, keresahan masyarakat tidak terakomodir mengingat pengaturan yang dimiliki saat ini tidak tegas dan tidak komprehensif mengatur terkait perlindungan data pribadi. Seiring dengan perkembangan zaman, data pribadi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga terhadap kegiatan pemrosesan data harus mendapat pengawasan dan keamanan optimal karena data pribadi merupakan privasi seseorang yang wajib dijaga kerahasiaannya. Kasus peretasan data pribadi di Indonesia akhir - akhir ini semakin marak dalam segala lapisan masyarakat. Terutama pada kondisi pandemi saat ini yaitu banyak data kesehatan Pasien di retas dan diperdagangkan dalam situs *dark web* oleh pihak ketiga.⁵

⁴ Normand Normand Edwin Elnizar, *Hukum Online Berita, Indonesia*, “*Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”. 20 Agustus 2021. Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-perbedaan-gdpr-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-lt5d51374ccedd/>.

⁵ Makarim. Edmond, (2005). *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35.

Data kesehatan tersebut meliputi nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat, Rekam Medis dan lain sebagainya. Kemudian, hasil tes Covid19 (*CoronaVirus Disease 19*) juga diungkapkan secara tanpa hak dengan terperinci yaitu gejala Pasien, tanggal mulai sakit dan tanggal pemeriksaan. Insiden peretasan data pribadi di bidang kesehatan lainnya yaitu terdapat pada aplikasi layanan kesehatan berbasis internet yang bernama *Electronic Health Alert Card* (e-HAC). E-HAC di dalamnya memuat sejumlah informasi terkait status kesehatan, informasi keberangkatan, Rekam Medis dan lain sebagainya.

Menurut literatur dan data yang telah dikumpulkan, telah terjadi insiden kebocoran data pasien Covid-19 sebanyak 231.636 (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam) yang diretas dan diperdagangkan secara bebas dalam *situs dark web melalui Rapid Forums* dengan akun bernama *Database Shopping*. Data pasien Covid-19 tersebut dijual secara lengkap yakni nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat, Rekam Medis dan lain sebagainya.⁶

Perkembangan dunia digital berpengaruh pula terhadap pelayanan di rumah sakit, hampir keseluruhan sistem perlahan namun pasti beralih ke sistem digital. Salah satunya adalah Rekam Medis (*Medical Record*) pasien mulai beralih menjadi berbasis elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik yang disebut Rekam Medis Elektronik (RME). Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023 dan sampai saat ini terus berproses terhadap semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.⁷

Electronic Medical Record atau sering dikenal Rekam Medis elektronik, merupakan catatan medis pasien dalam format elektronik tentang

⁶ Ravlindo Endison. "Perlindungan Hukum Data Kesehatan." Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

⁷ *Ibid*

informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu. Rekam Medis Elektronik bisa diakses dengan komputer atau sistem elektronik dari suatu jaringan, dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu.⁸ Salah satu komponen RME adalah pemasukan data (*data entry*), meliputi pengambilan data (*data capture*), input data, pencegahan *error*, *data entry* oleh dokter. Tampilan data (*data display*), meliputi *flowsheet* data pasien, ringkasan dan abstrak, tampilan dinamik. Sistem kueri dan surveilans meliputi pelayanan klinik, penelitian klinik, studi retrospektif dan administrasi.⁹

Manfaat teknologi informasi dalam Rekam Medis elektronik untuk efisiensi pencatatan dan pengolahan data, menyediakan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, memiliki tujuan untuk mengurangi *medical error* dan meningkatkan keamanan pasien (*patient safety*). Dengan sistem aplikasi manajemen Rekam Medis, maka *medical error* dalam pengambilan keputusan oleh Tenaga Kesehatan dapat dikurangi, karena setiap pengambilan keputusan akan berdasarkan data Rekam Medis Pasien yang telah ada dan sudah terintegrasi dengan unit pelayanan lainnya. Pencatatan medis secara manual dianggap tidak efisien. Rumah sakit harus menggunakan banyak kertas untuk membuat catatan medis bagi pasien. Ketika teknologi komputer mulai berkembang, teknologi Rekam Medis elektronik mulai dikembangkan untuk menggantikan pencatatan medis yang manual. Pada tahun 1967, RS *Latter Day Saints* menjadi rumah sakit pertama di Amerika yang mulai menggunakan *Electronic Health Record* (EHR). Platform aplikasi yang mereka gunakan dinamakan *Health Evaluation Through Logical*

⁸ Heinzer, M. 2010. *Essential Elements of Nursing Notes and the Transition to Electronic Health Records*. JHIM-FALL, Vol 24, No.4. hlm 53 -59.

⁹ Hakam Fahmi. "Integrasi Rekam Medis Elektronik(RME) Dengan Laboratory Information Systems (LIS) Dan Picture Archiving And Communications System (PACS)". *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* Vol. 6 No.2 Oktober 2018 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)

*Programming (HELP).*¹⁰

Singapura adalah salah satu negara yang sudah lama menerapkan Rekam Medis Elektronik sejak tahun 2011. RME nasional di Singapura bertujuan untuk mendukung konsep "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan Layanan Informasi Kesehatan Terpadu. Selain Singapura, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea, China, dan Inggris juga sudah lama menerapkan RME. Penerapan RME di Singapura dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai institusi kesehatan publik dan swasta. Sistem ini mengumpulkan ringkasan Rekam Medis pasien dari berbagai penyedia layanan kesehatan dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Selain Singapura, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea, China, dan Inggris juga sudah menerapkan RME dalam skala luas.¹¹

Indonesia merupakan negara berkembang di mana penerapan RME masih belum merata di semua fasilitas kesehatan. Beberapa rumah sakit dan Puskesmas belum sepenuhnya beralih ke sistem RME. Namun, Pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan RME melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022, dengan target seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjalankan sistem RME. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan yang menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat. Kementerian Kesehatan menyadari perkembangan teknologi digital dalam masyarakat yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan, sehingga Rekam Medis perlu diselenggarakan secara

¹⁰ <https://aviat.id/fakta-perkembangan-teknologi-rekam-medis-berbagai-negara>. Fakta Perkembangan Teknologi Rekam Medis di Berbagai Negara. Diakses 26 April 2025 jam 05.07 WIB.

¹¹ Ibid

elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.¹²

Rekam Medis Elektronik ini harus diperkuat dengan beberapa regulasi lain seperti telemedisin, kemudian penerapan bioteknologi, dan juga teknologi yang lain dengan menggunakan dasar Rekam Medis elektronik. Diharapkan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) salah satunya adalah Rumah Sakit harus siap beradaptasi di tengah misi Kemenkes RI untuk mentransformasikan dengan terus meningkatkan kapabilitas dan menjaga integritas layanan kesehatan. Pasien berhak mendapatkan isi Rekam Medis miliknya dan pemberian akses atas persetujuan pasien. Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan memiliki hak akses terhadap isi Rekam Medis elektronik seorang Pasien atas persetujuan pasien. Fasyankes wajib terhubung melalui platform terintegrasi dengan SATUSEHAT yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.¹³

Dengan semakin terbukanya sistem informasi pelayanan kesehatan termasuk data pribadi pasien, dapat menimbulkan risiko keamanan data pribadi Pasien. Oleh karena itu, sangat perlu kepastian hukum dalam hukum positif dalam perlindungan data pribadi di Indonesia dengan pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjawab tantangan praktik yang terjadi selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis bermaksud mendalami lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penelitian hukum dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dan Data Kesehatan dengan Diberlakukannya Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia”**.

¹² Hakam Fahmi. (2018). “Integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) Dengan Laboratory Information Systems (LIS) Dan Picture Archiving And Communications System (PACS)” *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* Vol. 6 No.2 Oktober 2018 ISSN: 2337-6007 (online); 2337-585X (Printed)

¹³ Fasyankes Wajib Terapkan Rekam Medis Elektronik – Sehat Negeriku (kemkes.go.id) diakses 26 Juni 2024 jam 05.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada serta diterapkan sebagaimana mestinya terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.
- 2) Memberikan gambaran dan kontribusi upaya pengelolaan risiko terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di

Indonesia.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H). pada Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan mengedepankan paradigma "ilmu sebagai proses" (*science as a process*) serta pandangan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang dan tidak pernah berhenti (tidak final) dalam upayanya mencari kebenaran di bidang objek yang dikaji.

a. Bagi teori

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dan literasi hukum.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dan kebijakan untuk memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.
- 2) Menjadi landasan hukum bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam mengevaluasi dan menganalisis pemenuhan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan

diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menjadi kajian literatur tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.
- 2) Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menyusun peraturan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk

¹⁴ Tirtakoesumah, A. J, Arafat, M. R. (2020). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pena Justisia, Pekalongan.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.¹⁵

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut.

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.

¹⁵ Hans Kelsen. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

¹⁶ Muhammad Yuris Azmi, 'Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia', Universitas Sebelas Maret, IV.1 (2016), 97–106.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁷

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

b. Teori Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.¹⁸ Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

¹⁸ L.J. van Apeldoorn. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 14-15.

sewenang-wenang. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. Kepastian hukum juga dapat diturunkan sebagai kepastian hukum (*rule of law security*) dan bukan sebagai kepastian hukum (*not rule of law security*).²⁰

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam

¹⁹ Manulang E. Fernando. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Edisi kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 155 – 156.

²⁰ *Ibid*

undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.²¹

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.²²

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, melainkan kepatuhan masyarakat atas hukum itu sendiri. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.

2. Kerangka Konsep

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat melalui aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dan memastikan kepastian hukum, serta memberikan sanksi

²¹ Rochmat Soemitro. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.

bagi pelanggar. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak hukumnya. Perlindungan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia, karena menjamin hak-hak setiap individu, mencegah kekacauan, mendukung kemajuan kesehatan dan melindungi korban pelanggaran hak. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan adil, karena setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka.²³

Data pribadi yang merupakan informasi tentang seseorang, dapat mengidentifikasi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi dapat berupa informasi fisik atau digital apa pun yang terkait dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Ini termasuk semua data yang dapat dikaitkan dengan seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, data akun, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengenali atau melacak individu. Mengenai data pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 29 bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan atau nonelektronik.²⁴

Data kesehatan adalah data yang terkait dengan kesehatan seseorang, baik fisik maupun mental, yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengobatan, penelitian, atau pemantauan kesehatan masyarakat. Data ini bisa berupa riwayat medis, gejala, diagnosis,

²³ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data pribadi*

prosedur, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Data kesehatan dianggap sebagai data sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Data kesehatan dianggap sebagai data sensitif dan memerlukan perlindungan khusus, seperti yang diatur dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Data ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengobatan, penelitian, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Data kesehatan yang dikelola dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengurangi kesalahan medis, dan meningkatkan komunikasi antar sistem.²⁵

Setiap dokter dan dokter gigi wajib membuat Rekam Medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi Rekam Medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukannya. Setiap catatan dalam Rekam Medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.²⁶

Rekam Medis pasien mulai beralih menjadi berbasis elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, Fasilitas

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang *Sistem Informasi Kesehatan*.

²⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktek Kedokteran*.

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis Pasien secara elektronik. Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023.²⁷

Dalam hal Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan Rekam Medis merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sifat data atau isi Rekam Medis Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa: " isi Rekam Medis milik Pasien." Isi Rekam disampaikan kepada Pasien. Selain kepada Pasien, dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain yaitu keluarga terdekat dalam hal Pasien di bawah umur 18 tahun dan atau Pasien dalam keadaan darurat.²⁸

Adapun hal-hal yang harus dirahasiakan itu menurut Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran meliputi segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di lapangan kedokteran. Dalam hal ini perlunya kepastian hukum yang secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dan perlindungan hukum terhadap pasien maupun instansi pelayanan kesehatan perorangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Topik permasalahan yang akan di kaji oleh penulis menggunakan :

²⁷ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220909/0841042/fasyankes-wajib-terapkan-rekam-medis-elektronik/>. Fasyankes Wajib Terapkan Rekam Medis Elektronik – Sehat Negeriku (kemkes.go.id), diakses 26 Juni 2024 pukul 05.00 WIB

²⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>. Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli (gramedia.com) diakses 26 Juni 2024 jam 04.55 WIB.

²⁹ <https://media.neliti.com/media/publication/161905-id-wajib-simpan-rahasia-kedokteran-versus-k-pdf>. Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Diakses 26 Juni 2024 jam 05.20 WIB.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial), sehingga dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan atau ketentuan perundang-undangan.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang menjadi pengikat atau landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan UU No 27 Thn 2022 ttg Perlindungan data pribadi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian atau majalah dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan perlindungan hukum pelaksanaan Rekam Medis Elektronik.

³⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu data yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis dengan alur pikir deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kesehatan dengan diberlakukannya Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisi teori-teori dalam upaya menjawab rumusan masalah, seperti teori data pribadi, data kesehatan, Rekam Medis Elektronik, Rumah Sakit, penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP DATA PRIBADI DAN DATA KESEHATAN DALAM HUKUM POSITIF

Berisi uraian dan analisis permasalahan pertama tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kesehatan.

BAB IV KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DAN DATA KESEHATAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI INDONESIA

Berisi uraian dan analisis permasalahan kedua tentang bagaimana kepastian hukum terhadap implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.